

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari hasil analisis dan uji hipotesis maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji statistik t, kepatuhan wajib pajak memiliki t hitung 2,034 dan nilai signifikansi sebesar 0,052 (Sig. > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Berdasarkan hasil uji statistik t, pelaksanaan pemeriksaan pajak memiliki t hitung 3,749 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 (Sig. < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Berdasarkan hasil uji statistik t, penerbitan surat paksa memiliki t hitung 0,007 dan nilai signifikansi sebesar 0,994 (Sig. > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan penerimaan pajak penghasilan.

B. KETERBATASAN

Peneliti ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang memungkinkan dan dapat menimbulkan hambatan terhadap hasil penelitian, diantaranya:

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dilakukan pada karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun, Ngawi, dan Ponorogo, sehingga sampel yang diperoleh berjumlah kecil.
2. Hasil Penelitian tidak dapat menjamin bahwa responden adalah karyawan bagian pemeriksaan pajak dan penagihan pajak karena pada kuesioner bagian identitas responden tidak ada bagian pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.
3. Penelitian ini tidak menggunakan data sekunder untuk menjelaskan penerimaan pajak penghasilan.
4. Responden menggunakan karyawan bagian pemeriksaan pajak dan penagihan pajak bukan wajib pajak

C. SARAN

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas, penelitian selanjutnya disarankan untuk:

1. Penelitian yang akan datang diharapkan menggunakan responden yang lebih luas ruang lingkungannya, misalnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se-Kanwil Jawa Timur II, agar hasilnya dapat lebih digeneralisasi.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah identitas responden pada kuesioner bagian penagihan pajak dan pemeriksaan pajak.
3. Penelitian yang akan datang hendaknya menambah data sekunder selain menyebarkan kuesioner sebagai data primer. Karena tambahan data sekunder berguna untuk menjelaskan penerimaan pajak penghasilan.
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan responden wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Asri Fika dan Herawti, Vinola.2009. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama”. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.
- Fitriani, Nanik. 2013. “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Bantul”. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1 No.2 hal 85-96.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 2001. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, Jogiyanto. 2011. “*Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*”. Edisi 2011. Yogyakarta: BPFE.
- Herryanto, Marisa dan Toly, Agus Arianto. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. *Tax & Accounting Review*. Vol.1, No.1 hal 124-135.
- Komarawati, Dewi Rina dan Mukhtaruddin.2012.“Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak di kabupaten lahat”. *Jurnal InFestasi* .Vol. 8 No.1 hal. 33 - 44
- Mahendra, Putu Putra dan Sukartha, I Made. 2014. “Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.3 hal 633-643.
- Mangoting, Yenni dan Sadjarto, Arja. 2013. “Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 15, No. 2 hal 1106-1116.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi 2006. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muniroh. 2011. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama”. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*. Vol 3, No 2 hal 40-56.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016. Akses 9 Maret 2017.
- Prihastanti, Rosy dan Kiswanto. 2015. “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak”. *Accounting Analysis Journal*. 4 (1) hal 1-9.

- Rahmawati., Fajar Nur., Santoso., Sigit, dan Hamidi, Nurhasan.2014. “Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta”.Jupe UNS. Vol. 3 No. 1 hal 72-82.
- Sinaga, Desmawaty .2009. “Analisis Penerbitan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Universitas Kristen Marantha:Skripsi. (Tidak Dipublikasikan)
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. “:Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. *Jurnal Ekonomi Binis*. No. 1 Vol.15 hal: 58-65.
- Suryadi. 2006.”Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak”. *Jurnal Keuangan Publik*. No. 1 Vol. 4 hal: 105-121.
- Sutrisno., Budi, Rina Arifati, dan Rita Andini. 2016. “*Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak*”. *Journal Of Accounting*. Volume 2 No.2 hal 1-20.
- Samrotun, Yuli Chomsatu. 2009. Pengaruh Proses Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *Paradigma*. Vol 06 No 02 hal: 1-7.
- Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Akses 11 Desember 2016
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Akses 11 Desember 2016
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Akses 11 Desember 2016